



RENJA

KECAMATAN MANYAR

2026

Jl. Raya Manyar No. 37 Telepon (031) 3951593

M A N Y A R (61151)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Camat Manyar Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2026 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, Oktober 2025



HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi.

Penata Tingkat I

NIP 19830418 201001 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD	23
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 OPD Kecamatan Manyar	32
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran Belanja Kecamatan Manyar Tahun 2024 10

Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 13

Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para 20

 Pemangku Kepentingan Tahun 2026 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 27

Tabel 3.2 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

 Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 27

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

 Tahun 2026 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi tanggung jawab semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, rencana kerja Kecamatan Manyar tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis. Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Manyar didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Manyar Tahun 2026 ini akan menjadi bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kecamatan Manyar Tahun 2026, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Manyar untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Rencana Kerja Kecamatan Manyar yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026, dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Manyar. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan serta mewujudkan visi dan misi Kecamatan Manyar, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat oleh karena itu program-program pembangunan tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Manyar Tahun 2026 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyar serta kerangka pendanaan daerah, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD dan mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Tahun 2026, dimaksudkan sebagai penjabaran visi, misi Pemerintah Daerah dan dalam Melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan Pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Manyar. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Manyar. Disamping itu Rencana Kerja Kecamatan Manyar ini juga digunakan sebagai evaluasi kegiatan tahun sebelumnya guna penyusunan kegiatan tahun mendatang. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Kecamatan Manyar pada Tahun 2026.

2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2026 dan DPA OPD Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Manyar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Manyar
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2024. Pencapaian Kinerja terhadap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

Anggaran Belanja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.3.859.243.269,00 yakni dari Belanja Operasi dengan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.750.556.959,0 dari rencana. Rincian pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Anggaran Belanja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	Belanja Operasi	3.859.243.269,00	3.750.556.959,02	108.686.309,98	97,18%
	Belanja Pegawai	2.807.923.655,00	2.731.704.807,02	76.218.847,98	97,29
	Belanja Barang dan Jasa	1.051.319.614,00	1.018.852.152,00	32.467.462,00	96,91%
2	Belanja Modal	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik, dan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Manyar mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam setiap tahun akan disusun Rencana Kinerja Tahun OPD.

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana;
3. Peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Ketetapan dan keakuratan penyedia informasi kependudukan;
5. Peningkatan kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat;
6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman keindahan) dalam rangka penegakan Perda di Kabupaten Gresik;
7. Demo/protes terhadap perda/perbup;
8. Keberadaan PERDA tentang penyelenggaraan trantibun;
9. Keberadaan PERDA tentang PSK dan miras;
10. Jumlah hari besar yang di rayakan;
11. Bantuan sarana ibadah;
12. Peningkatan jumlah usaha perekonomian;
13. Peningkatan kopetensi masyarakat dalam pengembangan usaha perekonomian;
14. Peningkatan hasil produksi;
15. Penyaluran bantuan santunan kematian dan raskin;
16. Ketepatan data anak yatim untuk diberikan santunan;
17. Peningkatan kopetensi masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- 18. Peningkatan jumlah kader lingkungan;
- 19. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- 20. Pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan.

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2024 terhadap capaian Renstra SKPD Kecamatan Manyar dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.2 (T-C.30) Capaian Kinerja Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berikut.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Ket
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2025 (n)	2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Nilai IKM Pelayanan Publik di Kecamatan	-	-	90	92	93	94	83,46	84.57	-	85	86	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang di hadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Terbatasnya Program Peningkatan SDM bagi petugas di Kecamatan Manyar sehingga mempengaruhi kompetensi petugas;
- 2. Terbatasnya Sarana Prasarana di Lingkungan Kecamatan Manyar sehingga Kecamatan Manyar terbatas dalam memberikan layanan penunjang yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;

3. Masih rendahnya tingkat disiplin pegawai sebagai aparatur pelayan publik;
4. Masih terbatasnya ketersediaan Sarana Prasarana yang menunjang akses data dan informasi untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan gedung Kecamatan sehingga sulit untuk membangun gedung yang berorientasi pada peningkatan Pelayanan Publik.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari OPD yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang memuat usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026, yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan Usulan Program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2026 untuk Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada Tabel 2.3 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

NO	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN MANYAR			KECAMATAN MANYAR		
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		100	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		100

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian n sasaran program OPD	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian n sasaran program OPD	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
e	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12

b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		

		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	74%		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	74%
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	50%		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	50%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7
b	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tertibum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tertibum	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23
b	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23

2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk di sesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Adapun usulan-usulan Program dan Kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku Kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 (T-C.32) sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	KECAMATAN MANYAR		
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
e	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	74%
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	50%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7
b	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaikan konflik di kecamatan yang di fasilitasi	

1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23
b	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu fungsi pemerintahan. Dalam tahun anggaran 2026 Kecamatan Manyar mendapatkan kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, terhadap kebijakan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 01 Ayat 12, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Manyar tahun 2026 sebagai bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Manyar 2025 Rencana APBD Kabupaten Gresik tahun 2026.

Dengan mengacu pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Manyar tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*”

Tujuan Renja yang mengacu pada tujuan Renstra :

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Dengan sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang di tetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond*.

Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut seabai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Manyar waktu jangka menengah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan serta mewujudkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan usaha perekonomian;
5. Terwujudnyan peran aktif masarakat dalam merencanakan melaksanakan pembangunan desa;
6. Peningkatan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat dalam pengolahan sampah;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
8. Meningkatkan kegiatan dalam pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan Gresik Berhias (Bersih, Hijau, Asri)

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

No	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkat-nya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	93	93,50	93,75	94	94	94,25

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak stake holders yang dilaksanakan melalui forum OPD, ditetapkan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik akan melaksanakan 5 Program, 12 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Untuk Program dan kegiatan ini bisa dilihat pada lampiran Tabel 3.2 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2026		2027	
				Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		KECAMATAN MANYAR					
7		UNSUR KEWILAYAHAN			4.079.302.070		4.200.284.615
7	01	KECAMATAN					
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		3.829.761.499		3.943.343.274
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000
7	01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan		3.226.165.522		3.289.392.774
7	01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	3.226.165.522	25 Orang	3.289.392.774

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran		105.028.916		116.102.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	30.408.500	8	31.500.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	25.000.000	10	28.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.000.000	4	5.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	19.620.416	12	21.602.000
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	25.000.000	7	30.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		443.037.061		443.781.500
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	#REF!	70.555.561,00	#REF!	71.300.000
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	372.481.500	12	372.481.500
7	01	01	2.09				Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah		52.530.000		91.067.000
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7	01	01	2.09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52	39.400.000	52	45.780.000
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	13.130.000	24	45.287.000
7	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		154.071.616		158.641.000
							Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%		100%	

									Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%		100%	
									Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%		100%	
7	01	03	2.01					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			44.071.616		46.641.000
7	01	03	2.01	0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	44.071.616	20 Lembaga	46.641.000
7	01	03	2.03					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			110.000.000		112.000.000
7	01	03	2.03	0001				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	80.000.000	7	75.000.000
7	01	03	2.03	0004				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
									Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	30.000.000	4	37.000.000
7	01	04						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi		55.281.724		56.921.251

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarutibum		55.281.724		56.921.251
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	55.281.724	12	56.921.251
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		40.187.231		41.379.090
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa		40.187.231		41.379.090
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23	35.687.231	23	36.779.090
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23	4.500.000	23	4.600.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 OPD KECAMATAN MANYAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan SIPD-RI sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 OPD

Kecamatan Manyar

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1				2	3	4	5
				KECAMATAN MANYAR			
				UNSUR KEWILAYAHAN			
01				KECAMATAN			
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		3.829.761.000
01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	3.000.000
01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.000.000
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan		3.226.165.100
01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	3.226.165.100
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran		105.028.900
01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	30.408.500
01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	25.000.000

01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	5.000.000
01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	19.620.400
7	01	01	2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	25.000.000
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		443.037.000
01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	#REF!	70.555.500,00
01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	372.481.500
01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah		52.530.000
01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52	39.400.000
01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	13.130.000
01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			154.072.000
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	
01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			44.072.000
01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga	44.072.000
01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			110.000.000
01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	80.000.000

01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	30.000.000
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang di fasilitasi		55.282.000
01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum		55.282.000
01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	55.282.000
01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		40.187.000
01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa		40.187.000
01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23	35.687.000
01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	23	4.500.000

BAB V

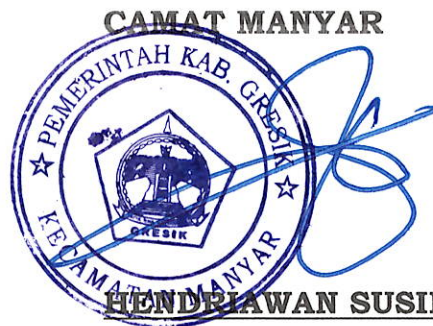
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan Kecamatan Gresik harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2026;

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2026 diharapkan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Gresik, Oktober 2025

Gresik, Oktober 2025



HENDRIWAN SUSILO, S.Psi.

Penata Tingkat I

NIP 19830418 201001 1 007